

Andalas Journal of International Studies



Toni Dian Effendi

Review of Sister Province Between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan

Putiviola Elian Nasir

Dominasi Maskulinitas dalam Militer: Analisis Konstruksi Budaya terhadap Gender dalam Militer Melalui Perang

Virtuous Setyaka dan Febrina Mulya

Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia

Iwan Sulistyو

Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara

Cici Anisa Fimaliza

Strategi Organisasi Perempuan Anti-Trafficking Apne Aap Dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India

Andalas Journal of
International
Studies

Volume 3

No. 2

Halaman
101-207

Padang
Nov 2014

ISSN
2301-8208



**Andalas Institute of International Studies
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Andalas University**

Andalas Journal of International Studies

ISSN: 2301 - 8208

Published by
Andalas Institute of International Studies – ASSIST
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Padang

Editor in Chief : Haiyyu Darman Moenir
Editorial Board : Ranny Emilia, Apriwan
Associate Editors : Virtuous Setyaka, Putiviola Elia Nasir, Sofia Trisni
Design/lay out : Trio Sirmareza/Ardila Putri
Editorial Advisory Board : Assoc. Prof. Denise M. Horn (Northeastern University)
Dr. Sukawarsini Djelantik (Universitas Khatolik Parahyangan)
Philip Vermonte (CSIS Jakarta)
Edwin Tambunan (Universitas Pelita Harapan)
Widya Setiabudi (Universitas Padjajaran)
Editorial Office : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis, Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266
Homepage : <http://ajis.fisip.unand.ac.id/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Submit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Andalas Journal of International Studies

Volume 3, No. 2, November 2014

ISSN 2301–8208

Review of Sister Province Between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan	101
Toni Dian Effendi	
Dominasi Maskulinitas dalam Militer: Analisis Konstruksi Budaya terhadap Gender dalam Militer melalui Film Perang	126
Putiviola Elian Nasir	
Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia	148
Virtuous Setyaka dan Febrina Mulya	
Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara	165
Iwan Sulistyio	
Strategi Organisasi Perempuan Anti <i>Trafficking</i> Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India	192
Cici Anisa Firmaliza	

Preface

By mentioning the presence of the name of Allah SWT, Andalas Journal of International Studies (AJIS) is very excited to published Volume 3 No. 2 in 2014. AJIS is a journal that discusses issues related under the umbrella of International Studies with kind of topics ranging from International relations, International education, International politics, International ethics, among so many other emerging issues in today's world.

As our aim in publishing this journal is to disseminate the results of all International Studies scholars, practitioners, lecturers, and researcher works with various topics and approaches in order to contribute to the development of International Studies both theoretically and practically.

Entering second edition in Volume 3, we express our gratitude to the authors who have been willing to submit papers whether it is the result of research, personal thoughts, as well as the contribution of the thesis students from the Department of International Relations.

In this edition, there are 2 papers presents a title relating to securitization issues, especially in the field of militaristic. Masculin dominancy in military: analysis of cultural construction toward gender in military through war film, written by Putiviola Elian Nasir. Iwan Sulistyio by lifting the theme the response of Indonesia in an effort to counterbalance the development of military power in Southeast Asia during the 1998-2010 period.

In the next paper, Virtuous Setyaka in collaboration with Febrina Mulya elaborated transnational civil society and democratization in Indonesia. Toni Dian Effendi entitled by the Review of Sister Province between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan. And the last, written by Cici Anisa Firmaliza with title strategy and effort undertaken by an anti-trafficking NGO called Apne Aap on addressing human trafficking issue in India

With the biggest gratitude, we would also like to thank the editorial board, who has worked hard in the preparation of these papers, so in the end it can come up to be a printed journal.

Editorial Team

Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara

Iwan Sulistyo⁵⁷
iwsulisty@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the response of Indonesia in an effort to counterbalance the development of military power in Southeast Asia during the 1998-2010 periods. This response is placed on the dimensions of the development policy of Indonesia's defense posture. The author uses a case study design. Through analysis of various documents, books, journals, and other sources as well as interviews with several experts in the field of defense and military, the author argues that Indonesia's defense posture development policy (land, sea, and air) in response to the military development in the countries of the Southeast Asia region during 1998-2010 period was intended to achieve more deterrent power than building an offensive force. The policy was made in light of the perception that the countries in Southeast Asia had the potential to threaten the security and sovereignty of Indonesia. Meanwhile, Indonesia's ability to build up military strength in the upper levels was very limited deterrent. Limited sources of funding and political support as well as weaknesses in analyzing the strategic environment of the region led to the development of the policy could not achieve the level of deterrent and also have not gotten to the point 'strategic stability'. Indonesia was plagued by the problems of arms embargo by foreign countries and still has problems in the institutionalization of research and development.

Keywords: *action-reaction spiral, Indonesia's defense posture, deterrence, strategic stability.*

⁵⁷ Staf Pengajar Luar Biasa pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Andalas, Padang. Tulisan ini merupakan sebagian dari tesis penulis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012. Tesis tersebut ditulis di bawah bimbingan Drs. Dafri Agussalim, M.A. dan Nur Rachmat Yuliantoro, M.A.(IR), Ph.D. Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan dan pemikiran keduanya.

Pendahuluan

Periode awal 1990-an, yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya, justru memberikan tantangan baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan berakhirnya perang dingin, maka negara-negara di kawasan ini, yang tergabung di dalam *the Association of South-East Asian Nations* (ASEAN), akan dihadapkan kepada apa yang disebut sebagai *the new post-Cold War era*.

Hal ini diamati oleh Alan Collins, seorang pengajar ilmu politik pada University of Wales. Pengamatannya tersebut kemudian dibukukan ke dalam sebuah karya berjudul *The Security Dilemmas of Southeast Asia*.⁵⁸ Collins mengemukakan serangkaian indikator yang menunjukkan betapa kawasan Asia Tenggara, pada awal era 1990-an itu, masuk ke dalam “*a period of uncertainty at best and rising tension at worst*”, yakni pengadaan senjata oleh negara-negara anggota ASEAN, mencairnya pertentangan di dalam teritorial/wilayah usai Perang Dingin, kemunculan Cina sebagai sebuah hegemoni kawasan, dan hampir

meratanya ketegangan etnik di seluruh wilayah.⁵⁹

Pengamatan di atas bermakna bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih dan terus berupaya memperkuat postur pertahanan (kekuatan dan kemampuan) militernya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat di kawasan Asia Tenggara juga tersimpan sejumlah sengketa tapal batas wilayah/teritorial antar-negara.

Tulisan ini difokuskan pada dimensi kepentingan nasional Indonesia dalam upaya memperkuat postur militer/pertahanan guna menjaga kedaulatan teritorialnya. Penulis lebih menyoroti persoalan bagaimana Indonesia merespon dinamika kawasan atau ancaman lingkungan strategis, terutama dalam merespon pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara pada rentang waktu 1998-2010. Sebab, interval 2004-2009,⁶⁰ menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), adalah masa di mana

⁵⁸ Alan Collins, *The Security Dilemmas of Southeast Asia* (London: MacMillan Press, 2000), 1.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Teguh Santosa, dkk., *Komisi I: Senjata-Satelit-Diplomasi* (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2009), 68.

pelanggaran kedaulatan menjadi isu yang sangat mengemuka.⁶¹

Kerangka Teori dan Metodologi

Di dalam tulisan ini penulis menggunakan teori *deterrence*, *defense*, *arms race*, dan *security dilemma*.

Pengertian inti dari *deterrence*, menurut Buzan, ialah membuat pelbagai ancaman militer yang digunakan untuk mencegah aktor lain melakukan tindakan agresif. Ringkasnya, *deterrence* berupaya menghentikan segala tindakan yang tidak dikehendaki sebelum terjadi.

⁶¹ Dinamika lingkungan strategis di suatu kawasan dari waktu ke waktu memang memiliki pelbagai ragam dimensi ancaman, baik militer maupun non-militer, antara lain terorisme, gerakan separatis, bencana alam, penyakit menular, penyelundupan senjata, dan sebagainya. Indonesia sendiri, seperti yang dapat ditemukan di dalam Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008* (Jakarta: Dephan RI, 2008), 7, tersedia di http://www2.kemhan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf, diakses 23 April 2011 – memandangkan bahwa “agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal” adalah bagian dari ancaman militer. Akan tetapi, di dalam tulisan ini, penulis secara lebih spesifik hanya menyoroti ancaman yang bersifat tradisional (militer), yakni berupa pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pelbagai upaya pembangunan postur pertahanan tersebut dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

Dengan logika semacam ini, konsep *deterrence* mencakup *denial* (penyangkalan) dan *retaliation* (pembalasan).⁶² Walaupun ada perdebatan dalam pemahaman tentang *defense* dan *deterrence*, sebagaimana disampaikan Buzan,⁶³ pembangunan postur (kekuatan dan kemampuan) pertahanan Indonesia di dalam tulisan ini dipahami sebagai kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional guna menjaga kedaulatan negara-bangsa.

John Herz menjelaskan, di dalam lingkungan internasional yang sifatnya anarkis, tercipta rasa salingtakut antarnegara-bangsa karena adanya pemahaman yang keliru. Dengan kondisi saling curiga itu, dimensi *security* menjadi prioritas utama sehingga tiap-tiap negara-bangsa akan berusaha meraih serta memperkuat keamanan dengan cara meningkatkan *military expenditure* (belanja militer)-nya. Selain itu, upaya agar kian unggul dari segi kemampuan militer juga tidak dapat dilepaskan. Alhasil, terjadilah perlombaan senjata antarnegara-bangsa. Dengan kata lain, manakala suatu negara mencoba meningkatkan kekuatannya, maka negara yang

⁶² Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* (London: MacMillan Press, 1987), 136.

⁶³ Lihat *ibid.*, 135.

lain, secepat itu pula, juga akan berupaya melakukan hal yang sama. Dengan demikian, pada kondisi inilah tiap negara terjebak di dalam suatu dilema, yang kemudian disebut sebagai dilema keamanan berupa perlombaan senjata (*arms racing*).⁶⁴ Perlombaan senjata, bagi Buzan, merupakan implikasi dari perkembangan teknologi militer dalam hubungan internasional.⁶⁵

Dalam perlombaan senjata, ada tiga model yang saling melengkapi yang dapat menjelaskan proses suatu negara dalam meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata.

Pertama, model aksi-reaksi yang menjelaskan bahwa faktor eksternal sebuah negara adalah pendorong utama dari dinamika persenjataan.⁶⁶ Karena model ini terlihat sederhana, tetapi rumit dalam implementasinya, maka di tengah kesulitan dalam upaya mengidentifikasi hal yang sangat spesifik dari proses aksi-reaksi, Buzan memberikan anjuran dengan melakukan beberapa tahapan yang patut digunakan. Di bagian awal, kata

Buzan, bisa memulainya dengan menguji *idiom* (ungkapan) dari aksi-reaksi. Artinya, jenis-jenis aksi atau tindakan yang dilakukan oleh negara dalam proses. Kemudian, variabel-variabel dalam pola respon yang dapat diidentifikasi, terutama *magnitude* (besaran atau ukuran), *timing* (pilihan waktu), dan *awareness* (kesadaran) dari para aktor yang terlibat di dalam proses. Secara umum, *magnitude* terkait dengan hal proporsi reaksi apa yang menunjang untuk memicu terjadinya aksi; *timing* terkait dengan hal kecepatan dan urutan interaksi; dan *awareness* berkaitan dengan sejauh mana pihak yang terlibat dalam proses menyadari dampak satu dengan yang lain, dan apakah mereka mengatur perilaku mereka sendiri.⁶⁷

Kedua, model struktur domestik. Model ini bersandar pada gagasan bahwa dinamika persenjataan dihasilkan oleh kekuatan di dalam negara, yang mencakup kekuatan atas dinamika persenjataan dalam kaitan dengan dimensi ekonomi, organisasi, dan politik negara-negara.⁶⁸ Dalam konteks ini, pelembagaan riset militer (*the institutionalization of military research and development*) memainkan

⁶⁴ John H. Herz, 'Idealist Internationalism and Security Dilemma', *World Politics*, vol. 2, no. 2, 1950, pp. 157-158. Lihat juga John H. Herz, *International Politics in the Atomic Age* (New York: Columbia University Press, 1959), 231.

⁶⁵ Buzan, *op.cit.*, 69.

⁶⁶ *Ibid.*, 74-76.

⁶⁷ *Ibid.*, 84.

⁶⁸ *Ibid.*, 74 dan 94.

peran yang sangat penting. Kata Buzan, tidak ada negara yang dapat menjadi negara yang sepenuhnya independen dalam hal memproduksi persenjataan tanpa basis R&D yang dimilikinya.⁶⁹

Ketiga, sebagai pelengkap dua model terdahulu, adalah model imperatif teknologis yang terkait dengan bagaimana cara memaknai dinamika persenjataan dalam konteks proses kualitatif yang umum dalam kemajuan teknologi.⁷⁰

Dalam tulisan ini, model aksi-reaksi adalah model yang sangat relevan untuk menjelaskan respon Indonesia guna mencapai kepentingan nasional (untuk bertahan dari ancaman eksternal). Karena relatif sulit untuk mengidentifikasi motif apa yang mendasari Indonesia dalam melakukan respon, penulis mencoba mengidentifikasi hal ini dengan kepentingan nasional yang dijadikan dasar oleh Indonesia. Identifikasi motif juga bisa didekati dengan ragam isu yang mengemuka pada *timing* tertentu, misalnya meruncingnya konflik/sengketa tapal batas antara Indonesia dan negara lain atau pelbagai kejadian yang mengarah pada konflik

antarnegara berskala kecil. Di sini juga akan dijelaskan *timing*, yakni seberapa cepat Indonesia merespon upaya negara lain dalam menggalang kekuatan pertahanan.

Dalam hal indikator analisis, penulis menggunakan data pembangunan postur militer, data anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, dan data jenis persenjataan yang dimiliki masing-masing negara.

Sementara itu, tulisan ini juga memakai konsep *balance of power*.⁷¹ Perimbangan kekuatan yang dimaksud di dalam tesis ini adalah perimbangan kekuatan dalam hal jumlah kepemilikan senjata konvensional (non-nuklir) antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun, konsep *balance of power* ini masih sangat luas. Oleh karena itu, penulis menggunakan istilah '*strategic stability*' untuk menggambarkan perimbangan kekuatan antarnegara dengan lebih jelas. Colin Gray dengan cukup rinci menjelaskan bahwa:

⁷¹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 3rd edn, (Ney Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007), 44.

⁶⁹ *Ibid.*, 96

⁷⁰ *Ibid.*, 74.

Strategic stability, regarded technically strictly in military terms, was deemed to reside in a context where neither side could secure a major advantage by striking first. In the contemporary jargon of defence analysis, a stable context was one in which the first-strike bonus was low or negligible. Such a context was said to be 'crisis stable'. The most popular thesis in the West was that strategic stability was ensured by the mutual ability of the superpowers to inflict unacceptable damage upon each other in any and all circumstances. This strategic – perhaps anti-strategic – condition came to be known as mutual assured destruction (MAD). The roles of society were to pay for the nuclear armed forces and to serve uncomplainingly as hostage to the prudent and sober behaviour of its political leaders.⁷²

Istilah *strategic stability* ini sendiri memang berlatar-belakang Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya, AS dan Uni Soviet, di mana yang menjadi fokus telaah adalah senjata nuklir. Akan tetapi, di dalam tulisan ini penulis menyesuaikan konteks jenis senjata yang ditelaah, yaitu senjata

konvensional. Dengan demikian, *strategic stability* di sini dimaknai sebagai kondisi yang stabil antarnegara yang memiliki jumlah persenjataan konvensional yang berimbang.

Respon Indonesia

Penulis berargumen, kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan *deterrent* daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk membangun kekuatan militer di atas tingkat *deterrent* sangat terbatas. Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat *deterrent* dan juga belum sampai pada titik '*strategic stability*'.

Hal ini sangat terkait erat dengan motif utama dalam upaya penguatan postur pertahanan secara keseluruhan di mana

⁷² Colin S. Gray, *War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History* (New York: Routledge, 2007), 213.

Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi keselamatan penduduknya, utamanya berkaitan dengan posisi strategis yang dimiliki. Secara umum, fakta empiris menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar dari segi luas wilayah kedaulatan (1.890.754 km²) dan terbanyak dari segi jumlah penduduk (240.271.522 jiwa) di kawasan Asia Tenggara.

Sejak tahun 2003, Indonesia sudah berupaya melakukan penguatan postur pertahanan udaranya dengan secara bertahap membeli pesawat tempur jenis

Sukhoi dari Rusia. Sementara itu, mulai tahun 2004, Indonesia juga kembali memperkokoh postur pertahanan udara dan lautnya melalui penambahan pesawat tempur dan helikopter-serbu serta kapal perang, termasuk melakukan pengembangan sejumlah industri strategis domestik kendatipun tidak sepesat Singapura dan Malaysia. Tabel 1 berikut ini memperlihatkan rekapitulasi upaya Indonesia dalam memperkuat postur pertahanannya dalam rentang waktu 1998-2010.

Tabel 1
Kebijakan Indonesia dalam Upaya Memperkuat Postur Pertahanan 1998-2010⁷³

Waktu	Kebijakan	Keterangan
1998-2000	Rencana program <i>upgrade</i> sistem radar pertahanan udara yang dilakukan di penghujung tahun 1999	Tidak terlaksana
	Usulan pengadaan kapal selam buatan Korea Selatan	Tidak terlaksana
	Rencana pembelian enam unit domestic NC-212 MPAs dan tiga unit helikopter NBO-105 CB	Tidak terlaksana
2001-2004	Pembelian dua unit Su-27 dan Su-30 serta dua unit helikopter Mi-35 buatan Rusia dengan total kontrak sebesar \$500 juta	Terlaksana pada tahun 2003 (Su-27 dan Su-30, masing-masing dua unit)
	Rencana pembelian sepuluh Su-27 dan dua Su-30 pada tahun 2004	Terlaksana secara bertahap
	Rencana pembelian dua unit kapal selam, satu unit pada tahun 2005 dan satu unit lagi pada tahun 2009	Tidak terlaksana
	Rencana pembelian empat unit <i>guided-missile destroyers</i> , dua unit kapal penyapu ranjau, dan misil <i>Exocet</i> buatan Prancis	Tidak terlaksana

⁷³ Dihimpun dari NIDS, *East Asian Strategic Review 2000* (Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2000), 53; NIDS, *East Asian Strategic Review 2004* (Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2004), 151; NIDS, *East Asian Strategic Review 2005* (Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2005), 153; dan Santosa, *op.cit*, 59.

	Rencana pembelian delapan unit pesawat tempur Sukhoi (enam Su-27SKs dan dua Su30-MKs), sebagai penambah untuk empat unit pesawat Sukhoi yang telah dimiliki	Terlaksana
	Rencana pembelian sebelas unit pesawat angkut jenis PLZ-M28-05 dari Polandia untuk Angkatan Laut	Tidak terlaksana
2004-2010	Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan Darat, yaitu 33 unit panzer jenis APS-2 (6X6), helikopter Mi-35 dan Mi-17, Rudal Groom, termasuk membeli 32 panzer VAB dari Perancis (untuk mendukung Operasi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan)	Terlaksana
	Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan Laut, yaitu pembelian kapal korvet kelas <i>Sigma</i> dan Landing Platform Dok (LPD), dan pesawat NC-212	Terlaksana
	Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan Udara, yaitu pembelian pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30	Terlaksana

1998-2000: Beban Krisis Ekonomi 1997 dan Reformasi Pemerintahan 1998

Pada masa ini, Indonesia tidak banyak ikut serta di dalam aksi-reaksi guna menggalang kekuatan militer karena memiliki beban krisis ekonomi 1997⁷⁴ dan lebih terfokus pada reformasi pemerintahan yang dimulai sejak 1998. Spiral aksi-reaksi justru lebih melibatkan negara-negara ASEAN yang lain, terutama antara Singapura (pengadaan delapan unit helikopter AH-64, pesawat pengisian

bahan bakar jenis RC-135, dua unit kapal selam kelas *Sjoormen*, dan pembangunan kapasitas pertahanan yang terintegrasi dengan teknologi tinggi) dan Malaysia (*upgrade* terhadap tujuh belas unit MiG-29N, dua puluh pesawat tempur, dua unit korvet buatan Italia, dua unit *frigate* buatan Inggris, enam unit helikopter *Super Lynx*, dan enam unit kapal patroli domestik).⁷⁵

Sanggup bertahan dari terpaan krisis ekonomi 1997, Singapura boleh dikatakan adalah satu-satunya negara

⁷⁴ Pada tahun 1998, Indonesia berada pada posisi terlemah secara ekonomi di antara negara-negara ASEAN lainnya karena memiliki GDP (*Gross Domestic Product*) sebesar -13,7%. Lihat selengkapnya Jose L. Tongzon, *The Economies of Southeast Asia: Before and After the Crisis*, 2nd edn, (Massachusetts: Edward Elgard Publishing, 2002), 16.

⁷⁵ Data bersumber dari situs web the Singapore Ministry of Defence, isu-isu relevan dari *Asian Defence and Diplomacy*, *Asian Defence Journal*, *Asia-Pacific Defence Reporter*, dan pelbagai laporan berita yang diterbitkan di negara-negara yang relevan, sebagaimana dikutip di dalam *East Asian Strategic Review 2000*, *op.cit.*, 52-53.

yang paling gencar melakukan penguatan postur pertahanannya, disusul oleh Malaysia. Dari segi skala *magnitude* (besaran), upaya kedua negara ini terlihat lebih besar dari Indonesia yang hanya melakukan upaya *upgrade* terhadap sistem radar pertahanan udara (itu pun akan dimulai di akhir tahun 1999) serta pembelian kapal selam buatan Korea Selatan, enam unit domestic NC-212 MPAs, dan tiga unit helikopter NBO-105 CB. Motif yang melatarbelakangi kebijakan Singapura yang secara gencar memperkuat postur militernya dapat didasarkan pada spektrum geo-politik, geo-ekonomi, geo-strategis, dan kepentingan nasional. Argumennya ialah mengingat Singapura merupakan negara kecil yang bertetangga dengan negara kepulauan yang sangat besar dan luas di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, maka penting untuk menggalang kekuatan militer agar Singapura mampu *survive*.

Sementara itu, motif yang melatarbelakangi Malaysia yang juga begitu gencar dalam membangun kekuatan militer, terutama dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, setidaknya dapat dikaitkan dengan aspek utama yang paling mendasar, yakni hubungan kesejarahan yang

panjang antara dua negara yang rentan tersulut emosi dan mengarah ke kondisi konfliktual. Penulis berargumen, kendatipun kerap dipahami sebagai dua negara serumpun (Melayu) yang begitu akrab; tetapi, kondisi bersahabat dan konfliktual Indonesia-Malaysia yang sedemikian fluktuatif akan memungkinkan terciptanya rasa saling curiga dan rasa tidak aman manakala terjadi eskalasi gesekan yang kian rumit dalam hal persoalan tapal batas kedaulatan. Hal ini pada akhirnya bisa saja memicu upaya penguatan diri dalam hal persenjataan militer kedua atau salah satu negara.

Karenanya, ketiadaan respon Indonesia dalam memperkuat postur militernya atas upaya pembangunan kekuatan militer yang dilakukan utamanya oleh Singapura dan Malaysia ini menjadikan potensi ancaman tersebut semakin kuat. Padahal, idealnya, bila Indonesia melakukan respon, seberapapun kecil besaran *magnitude*-nya, hal ini kemungkinan cukup mampu menangkal pelbagai ancaman yang berasal dari gencarnya pembangunan pelbagai kekuatan tersebut, di samping juga secara umum untuk menjaga kedaulatan teritorial.

2001-2004: Penguatan Postur Pertahanan Udara

Pada tahun 2002, di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, baru terlihat langkah secara perlahan yang cukup signifikan dalam upaya memperkuat kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia melalui modernisasi persenjataan, khususnya pertahanan udara. Pada masa ini, perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara yang menyolok ialah upaya penguatan postur militer yang dilakukan terutama oleh Singapura dan Malaysia.

Terbebani oleh anggaran negara yang minim, Megawati mengawali anggaran pertahanan Indonesia pada angka Rp9,8 triliun per tahun, kendatipun kebutuhan sesungguhnya adalah tiga kali lipat dari angka ini.⁷⁶ Namun, karena tekanan embargo persenjataan dari pemerintah AS dan beban krisis ekonomi 1997 masih menjadi kendala, maka Indonesia hanya sanggup membeli dua unit Su-27 dan Su-30 serta dua unit helikopter Mi-35 buatan Rusia dengan total kontrak sebesar \$500 juta. Kesemuanya direncanakan akan dikirim ke Indonesia pada bulan

Agustus dan September,⁷⁷ dan akhirnya tiba di Indonesia pada 27 Agustus 2003.⁷⁸ Selain itu, sebenarnya di sini juga ada rencana pembelian kapal selam kelas *Lada* dan kelas *Kilo*, tetapi gagal terwujud hingga 2010.⁷⁹ Pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi dari Rusia ini akan terus berlanjut untuk membentuk satu skuadron tempur yang terdiri dari dua belas pesawat. Sebagai tambahan, Indonesia juga berencana untuk membeli sepuluh Su-27 dan dua Su-30 pada tahun 2004.⁸⁰ Upaya modernisasi yang dilakukan melalui kontrak berjangka waktu sepuluh tahun ini dapat dikatakan terobosan yang baru pasca-krisis ekonomi 1997 dan bahkan usaha yang cukup signifikan sejak permulaan 1990-an dalam penguatan kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia.

Di dalam total perjanjian sebesar \$500 juta ini, Indonesia direncanakan membayar sebesar \$190 juta secara tunai dan sisanya bakal diatur dalam kerja sama perdagangan, seperti hasil pertanian.⁸¹ Sumber lain menyebutkan,

⁷⁶ Wawancara dengan Andi Widjajanto, pengamat militer/pertahanan, Depok, 27 Mei 2011.

⁷⁷ *East Asian Strategic Review 2004, op.cit.*, 151.

⁷⁸ Lihat Chappy Hakim, *Dari Segara ke Angkasa: Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Gramedia, 2005), 178-179.

⁷⁹ Wawancara dengan Widjajanto.

⁸⁰ *East Asian Strategic Review 2004, op.cit.*, 151.

⁸¹ *Ibid.*

pembelian ini dilakukan melalui sistem imbal dagang sebesar \$175 juta dengan pelbagai produk seperti minyak kelapa sawit mentah dan karet.⁸² Sebagai bagian dari upaya modernisasi persenjataan laut, Indonesia juga berencana untuk membeli dua unit kapal selam, satu unit pada tahun 2005 dan satu unit lagi pada tahun 2009. Juga ada rencana untuk membeli empat unit *guided-missile destroyers*, dua unit kapal penyapu ranjau, dan misil *Exocet* buatan Prancis.⁸³ Selain pembelian pesawat tempur Sukhoi, untuk kali pertama pada masa ini juga diterbitkan *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003* yang kemudian disusul oleh edisi kedua pada tahun 2008. Namun, dalam konteks penguatan postur militer hingga awal tahun 2004, Indonesia masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran untuk TNI, di mana rata-rata TNI hanya memperoleh 30% dari perencanaan kebutuhan setiap tahun.⁸⁴

Keputusan Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara dalam tahun 2002 (teralisasi 2003) ini terlihat berbarengan dengan upaya sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Buktinya, pasca-pulih dari krisis 1997, Malaysia kembali melakukan penguatan postur pertahanannya di semua matra.⁸⁵ Kendati hampir bersamaan dari segi waktu, langkah Malaysia dalam membeli alat pukul ini terlihat lebih besar dalam hal jumlah peralatan dibanding Indonesia. Thailand, walaupun tidak sebesar Malaysia, pada waktu yang hampir bersamaan juga melakukan penguatan postur pertahanan pada ketiga angkatannya. Langkah Thailand ini terlihat lebih menyeluruh dibanding Indonesia yang hanya menitikberatkan pada penguatan postur pertahanan di matra udara. Motif Thailand dalam melakukan upaya ini tampaknya lebih kepada respon dan sekaligus antisipasi konflik di daerah yang berbatasan dengan langsung dengan Myanmar dan Kamboja.

Pada tahun 2004, Indonesia dan Singapura terlihat bersamaan dalam melakukan penguatan postur pertahanan. Walaupun pada 8 April

⁸² R.R. Emilia Yustinigrum, *Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia*, LIPI, Jakarta, 2011, <<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia->>, diakses 21 September 2011. Pembelian ini menyulut kontroversi publik dalam negeri Indonesia karena dilakukan oleh Presiden Megawati di tengah kondisi krisis ekonomi dan beban defisit APBN.

⁸³ *East Asian Strategic Review 2004*, *op.cit.*, 151.

⁸⁴ Lihat Markas Besar TNI, *Revisi Postur Tentara Nasional Indonesia Tahun 2000-2014* (Jakarta: Markas Besar TNI, 2004), 1.

⁸⁵ Data bersumber dari *East Asian Strategic Review 2004*, *op.cit.*, 150-152.

2004 Indonesia berencana untuk membeli lagi sebanyak delapan unit pesawat tempur Sukhoi (enam Su-27SKs dan dua Su30-MKs), sebagai penambah untuk empat unit pesawat Sukhoi yang telah dimiliki Indonesia, dan sebulan kemudian (4 Mei 2004) juga mengumumkan bahwa Angkatan Laut Indonesia akan membeli sebelas unit pesawat angkut jenis PLZ-M28-05 dari Polandia, hal ini tampaknya tidak sepadan dengan upaya Singapura yang bergerak dengan lompatan yang jauh lebih besar dengan memperkuat postur pertahanannya di hampir semua mata melalui integrasi dengan perangkat teknologi yang sangat canggih. Di samping motif utamanya adalah *survival of the nation-state*, upaya Singapura ini juga dipengaruhi oleh usaha kontra-terorisme pasca-serangan kelompok teroris di AS, 11 September 2001.⁸⁶

2004-2010: Penguatan Postur Pertahanan Darat, Laut, dan Udara; Upaya ke Arah Pengembangan Industri Strategis Domestik

Dalam masa ini, Indonesia juga memperkuat postur pertahanannya melalui pembelian sejumlah pesawat tempur. Upaya pengembangan industri

pertahanan domestik pada masa ini dapat dilihat dari *master plan* revitalisasi industri pertahanan yang dibuat sebagai bagian dari salah satu prioritas lima tahun ke depan pemerintah. Pembelian peralatan militer oleh Indonesia dalam interval waktu 2004-2009, menurut Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam periode tersebut, lebih didorong oleh pelbagai kasus yang disiarkan media masa, misalnya penyerobotan tanah milik Indonesia di perbatasan Sabah dan Serawak di mana perusahaan-perusahaan Malaysia terlalu menjorok masuk ke wilayah Indonesia, sementara Indonesia minim akan pos-pos penjagaan. Karenanya, guna menangkal hal tersebut, pada tahun 2006-2007 Indonesia memulai program modernisasi persenjataan, misalnya 6 unit helikopter-serbu Mi-17 dari Rusia. Kendati tidak masuk di bidang pertahanan militer, bagi Indonesia hal ini merupakan bagian dari bidang pertahanan dalam arti luas mengingat Indonesia dirugikan sebanyak Rp4 milyar dalam setahun dari *illegal logging*.⁸⁷ Di sini terlihat bahwa upaya memperkuat postur pertahanan Indonesia bukan

⁸⁶ Data bersumber dari *East Asian Strategic Review 2004, op.cit.*, 152 dan *East Asian Strategic Review 2005, op.cit.*, 155-156.

⁸⁷ Wawancara dengan Juwono Sudarsono, Jakarta, 12 Mei 2011.

merupakan respon atas dinamika lingkungan strategis yang berupa pembangunan kekuatan militer di kawasan, tetapi lebih kepada reaksi untuk menjaga pertahanan wilayah negara dalam arti yang luas, yaitu mencegah atau mengurangi kerugian negara akibat kejahatan lingkungan.

Pada 2006, Indonesia mendapatkan pinjaman lunak sebesar \$1 milyar dari Rusia untuk kerja sama teknik militer 2006-2010. Pinjaman ini kemudian diprioritaskan guna melengkapi jumlah peralatan militer, yakni pesawat tempur jenis Sukhoi hingga mencapai satu batalyon, termasuk pembelian sejumlah unit kapal selam, rudal, tank, dan helikopter.⁸⁸ Sumber lain menyebutkan bahwa pada 14 April 2006 Indonesia mengumumkan rencana pembelian pesawat tempur sebagai tambahan untuk enam unit Sukhoi yang sudah ada (Su-27Sk dan Su-30MK). Berbarengan dengan empat unit Sukhoi yang telah dibeli pada tahun 2005, rencana pembelian ini merupakan bagian dari upaya membangun sebuah skuadron tempur dengan total biaya sekitar \$1 milyar dalam bentuk kredit ekspor yang disediakan Rusia. Selain itu,

Indonesia juga berencana membeli dua pesawat tempur pada tahun 2007.⁸⁹

Sungguhpun Indonesia pada tahun 2006 ini melakukan penguatan di sektor pertahanan udara, tetapi hal ini terlihat belum seberapa karena, pada saat yang sama, Singapura justru mempertangguh pertahanan udara dan lautnya dengan skala *magnitude* yang jauh lebih besar, terutama dalam hal kecanggihan teknologi. Berbarengan dengan itu, walaupun tidak sebesar Singapura dan bisa jadi sedikit lebih besar dari Indonesia, Malaysia juga memperkuat matra laut dan udaranya.⁹⁰

Pada tahun 2007 ini, Indonesia juga melakukan penambahan satu unit (dari empat yang dipesan) kapal perang kelas Sigma (*Ship Integrated Geometrical Modularity Approach*) dari Belanda, yang dilengkapi dengan anti serangan udara, anti kapal atas air, anti kapal selam, dan perang elektronika.⁹¹ Hal ini masih terlihat tidak sepadan dengan upaya Malaysia

⁸⁸ WIRA: *Media Informasi Departemen Pertahanan*, vol. 18, No. 4, November-Desember 2006, 6-7.

⁸⁹ NIDS, *East Asian Strategic Review 2007* (Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2007), 159.

⁹⁰ Data bersumber dari *The Military Balance 2003-2004*, 2006, sebagaimana dikutip di dalam *East Asian Strategic Review 2007*, *op.cit.*, 158 and 159-160.

⁹¹ 'Korvet Sigma TNI AL Buatan Belanda Tiba di Indonesia', *Antaraneews.com*, <<http://www.antaraneews.com/print/75637/maluku-religious-leaders-urge-people-not-be-provoked>>, diakses 16 November 2011.

yang pada tahun 2007 juga kembali menambah kekuatan pertahanan udaranya, yakni enam unit pesawat tempur Su-30MKM.⁹² Kemandirian di sektor industri strategis Indonesia dalam memenuhi kebutuhan peralatan tempur dalam negeri justru baru terlihat pada awal tahun 2010 ketika PT Pindad, salah satu industri strategis pembuat peralatan tempur darat, menghasilkan 33 unit panser jenis APS-2 (6X6) yang kemudian digunakan oleh TNI-AD sebanyak 20 unit, dan sisanya, sebanyak 13 unit, digunakan untuk misi perdamaian dunia oleh pasukan TNI AD di Lebanon.⁹³

Capaian Perkembangan Pertahanan Indonesia

Walaupun Indonesia telah melakukan pelbagai kebijakan pertahanan, tetapi ia belum mampu mengimbangi pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2010 antara lain

persoalan anggaran pertahanan yang masih minim, embargo persenjataan dari negara asing, dan keterbatasan pengembangan inovasi dan teknologi.

Perbandingan Postur Militer Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

Jumlah Personel Militer Aktif

Jika dicermati, dimensi postur pertahanan, kekuatan dan kemampuan militer masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya dari aspek jumlah personel militer aktif (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), terlihat sangat bervariasi. Dalam Tabel 2, penulis membandingkan jumlah personel militer aktif masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2010. Vietnam merupakan negara dengan jumlah personel militer aktif terbanyak di kawasan Asia Tenggara, yaitu 455.000 personel, menyusul Myanmar dengan 406.000 personel.

⁹² Data bersumber dari *East Asian Strategic Review 2007*, *op.cit.*, 160 dan NIDS, *East Asian Strategic Review 2009* (Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2009), 176.

⁹³ WIRA. *Media Informasi Departemen Pertahanan*, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2010, 7-9.

Tabel 2
Perimbangan Kekuatan Personel Militer Aktif
Negara-negara di Asia Tenggara (2010)

Negara	AD	AL	AU	Jumlah Personel Aktif	Para-militer	Cadangan
Brunei	4.900	1.000	1.100	7.000	2.250	700
Indonesia	233.000	45.000	24.000	302.000	280.000	400.000
Kamboja	75.000	2.800	1.500	124.300	67.000	45.000(<i>Provincial forces.</i>)
Laos	25.600	-	3.500	29.100	100.000	-
Malaysia	80.000	14.000	15.000	109.000	24.600	51.600
Myanmar	375.000	16.000	15.000	406.000	107.250	-
Filipina	80.000	24.000	16.000	120.000	40.500	131.000
Singapura	50.000	9.000	13.500	72.500	93.800	312.500
Thailand	190.000	69.860	46.000	305.860	113.700	200.000 +45.000
Vietnam	412.000	13.000	30.000	455.000	40.000	5.000.000

Diolah dari IISS, *The Military Balance 2010* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2010).

Sementara, selisih jumlah personel militer aktif antara Thailand dan Indonesia terlihat relatif tipis. Thailand memiliki jumlah personel militer aktif sebanyak 305.860 dan Indonesia sebesar 302.000 personel.⁹⁴ Adapun

Brunei Darussalam adalah negara di Asia Tenggara yang paling minim jumlah personel militer aktifnya, yaitu di angka 7.000.

⁹⁴ Angka ini pun masih jauh dari kondisi ideal untuk Indonesia. Padahal, idealnya, menurut Muhaimin, adalah sebesar 1% dari jumlah penduduk. Jadi, jika penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 240.271.522 jiwa, maka dibutuhkan sekitar 2.400.000 personel. Perhitungan semacam ini dapat ditemukan di dalam Yahya A. Muhaimin, *Bambu Runcing & Mesiu: Masalah*

Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia (Jakarta: Tiara Wacana, 2008), 83.

Jumlah Persenjataan Angkatan Darat

Tabel 3
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Darat
Negara-negara di Asia Tenggara (2010)

Negara	MBT	LT	AIVF	APC	Recce	ACV	Artillery
Brunei	-	20	-	39	-	39	24
Indonesia	-	350	11	356	142	509	1.010
Kamboja	150+	20+	1	190+	2	193+	428+
Laos	25	10	-	50	-	50	62+
Malaysia	48	26	44	835	314	1193	436
Myanmar	150	105	-	325	115	440	238+
Filipina	-	65	85	520	-	605	282+
Singapura	196	350	272+	1.280+	22	1.574+	335
Thailand	333	515	-	950	32+	982+	2.473+
Vietnam	1.315	620	300	1.380	100	1.780	3.040+

Diolah dari *The Military Balance 2010*. Keterangan: MBT (*Main Battle Tank*), LT (*Light Tank*), AIFV (*Armored Infantry Fighting Vehicle*), APC (*Armored Personnel Carrier*), Recce (*Reconnaissance*), dan ACV (*Air Cushion Vehicle*). ACV = AIFV + APC + Recce.

Selain jumlah personel militer aktif, variasi kekuatan dan kemampuan militer juga dapat dikaji dari jumlah senjatanya yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Tabel 3 di atas memperlihatkan jumlah kekuatan dan kemampuan militer yang dimiliki oleh Angkatan Darat masing-masing negara di Asia Tenggara. Terlihat bahwa Vietnam adalah negara dengan jumlah persenjataan ACV terbanyak, yakni

1.780 unit, disusul Singapura sebesar 1.574. Singapura tampak sebagai negara yang memiliki persenjataan di hampir semua variasi. Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia, Filipina, dan Thailand. Khusus dalam hal artileri, kemampuan dukung serang TNI AD masih berada di bawah rata-rata Vietnam (3.040) dan Thailand (2.473).

Angkatan Laut

Variasi dan perimbangan persenjataan juga bisa ditelaah dari kekuatan Angkatan Laut. Hanya empat negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal selam. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam terlihat berimbang karena masing-masing mempunyai dua unit (lihat Tabel 4). Dua unit kapal selam yang dimiliki Indonesia ini berada dalam kondisi tidak begitu layak beroperasi). Sementara, Singapura berada di urutan teratas dalam jumlah kapal selam, yaitu sebanyak empat unit. Namun,

dalam hal *principal surface*, Indonesia memiliki tiga puluh unit, menyusul Thailand dengan dua puluh unit, kemudian Malaysia dan Singapura berimbang di angka dua belas unit. Thailand unggul dalam jumlah *patrol and coastal combatants*, yaitu 90 unit, disusul oleh Filipina (62 unit), Myanmar (50 unit), dan Indonesia (41 unit). Indonesia pun harus mengakui Malaysia dalam hal jumlah peralatan amfibi terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 115 unit.

Tabel 4
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut
Negara-negara di Asia Tenggara (2010)

Negara	<i>Submarines</i>	<i>Principal Surface Combatant</i>	<i>Patrol and Coastal Combatants</i>	<i>Amphibious</i>	<i>Logistic & Support</i>
Brunei	-	-	16+	4	-
Indonesia	2	30	41	83	27
Kamboja	-	-	11	-	-
Laos	-	-	-	-	-
Malaysia	2	12	14	115	9
Myanmar	-	3	50	18	10
Filipina	-	1	62	7	6
Singapura	4	12	23	40	2
Thailand	-	20	90	2	15
Vietnam	2	11	38	6	20

Diolah dari *The Military Balance 2010*.

Angkatan Udara

Dalam hal jumlah alat pukul udara (lihat Tabel 5), Vietnam adalah yang terbanyak (219 unit), disusul oleh Thailand (165 unit), Myanmar (125 unit), dan Singapura (104 unit). Sementara, Indonesia (96 unit) berada sedikit di atas Malaysia yang memiliki 74 unit pesawat tempur. Akan tetapi, Filipina unggul dalam

hal jumlah helikopter (106 unit), menyusul kemudian adalah Vietnam (87 unit), dan Myanmar (66 unit). Indonesia (38 unit) hampir setara dengan Malaysia (37 unit), tetapi berada di bawah jumlah kekuatan helikopter Singapura (64 unit) dan Thailand (47 unit).

Tabel 5
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara
Negara-negara di Asia Tenggara (2010)

Negara	<i>Aircraft Combat</i>		<i>Helicopter</i>	
	Total	Rincian	Total	Rincian
Brunei	7	1 CN-235M, 4 PC-7 Turbo Trainer, 2 SF-260W Warrior	23	4 S-70A Black Hawk, 1 S-70C Black Hawk (VIP), 5 Bo-105 (armed, 81mm rockets), 2 Bell 206B Jet Ranger II, 10 Bell 212, 1 Bell 214 (SAR)
Indonesia	96	3 Su-27SK Flanker (AD), 7 F-16A Fighting Falcon, 3 F-16B Fighting Falcon, 8 F-5E Tiger II, 4 F-5F Tiger II, 3 Su-30 MKI Flanker, 11 A-4E Skyhawk, 7 Hawk MK109, 28 Hawk MK209, 12 OV-10F Bronco (kebanyakan tidak beroperasi)	38	10 S-58T, 5 NAS-332L (AS-332L) Super Puma (VIP/CSAR), 11 NAS-330 (SA-330) Puma (1 NAS-330SM VIP), 12 EC-120B Colibri
Kamboja	24	14 MiG-21bis Fishbed L & N, 2 An-24RV Coke, 1 BN-2 Islander, 1 Cessna 421, 2 Y-12, 5 P-92 Echo (pilot trg/recce), 5 L-39 Albatros (lead-in trg), 5	18	1 AS-350 Ecureuil, 2 Mi-26 Halo, 13 MI-17 (Mi-8MT) Hip H/Mi8 Hip, 1 Mi-8P Hip (VIP), 1 AS-365

		MiG-21UM <i>Mongol</i>		<i>Dauphin 2</i>
Laos	22	22 MiG-21bis <i>Fishbed L & N</i>	27	3 SA-360 <i>Dauphin</i> , 1 KA-32T <i>Helix C</i> (5 dalam pemesanan), 1 Mi-26 <i>Halo</i> , 1 Mi-6 <i>Hook</i> , 9 Mi-8, 12 Mi-17 (Mi-8MT) <i>Hip H</i>
Malaysia	74	13 F-5E <i>Tiger II</i> /F-5F <i>Tiger II</i> , 16 MiG-29N <i>Fulcrum</i> (ditarik dari tugas selama tahun 2010), 8 F/A-18D <i>Hornet</i> , 12 Su-30MKN (lebih dari 6 unit dalam pemesanan), 8 <i>Hawk</i> MK108, 2 RF-5E <i>Tigereye</i> , 4 Beech 200T, 2 KC-130H <i>Hercules</i>	37	20 S-61A-4 <i>Nuri</i> , 4 S-61N, 4 S-70A <i>Black Hawk</i> , 1 A-109, 8 SA-316 <i>Alouette III</i>
Myanmar	125	8 MiG-29B <i>Fulcrum</i> , 50 F-7 (MiG-21F) <i>Fishbed C</i> , 22 A-5M (Q-5II) <i>Fantan</i> , 2 An-12 <i>Cub</i> , 1 Ce-550 <i>Citation II</i> , 3 F-27 <i>Friendship</i> , 4 FH-227, 5 PC-6A <i>Turbo Porter</i> /PC-6B <i>Turbo Porter</i>	66	10 PZL W-3 <i>Sokol</i> , 11 Mi-17 (Mi-18MT) <i>Hip H</i> , 18 PZL Mi-2 <i>Hplite</i> , 12 Bell 205, 6 Bell 206 <i>Jet Ranger</i> , 9 SA-316 <i>Alouette III</i>
Filipina	30	15 OV-10 <i>Bronco</i> , 1 F-27 MK 200 MPA, 1 F-27-200 <i>Friendship</i> , 1 Rockwell <i>Turbo Commander</i> 690A	106	5 AUH-76, 20 MD-520MG, 1 S-70 A-5 (S-70A) <i>Black Hawk</i> , 1 SA-330L <i>Puma</i> , 6 AB-412SP <i>Griffon</i> , 6 Bell 412EP <i>Twin Huey</i> /Bell 412SP <i>Twin Huey</i> , 40 UH-1H <i>Iroquois</i> , 27 UH-1M <i>Iroquois</i>
Singapura	104	2 F-15SG (lebih dari 22 unit akan dikirim menjelang tahun 2012), 60 F-16C <i>Fighting</i>	64	12 AH-64D <i>Apache</i> , 18 AS-332M <i>Super Puma</i> (termasuk SAR), 10 CH-47SD

		<i>Falcon/F-16D Fighting Falcon</i> (termasuk yang dipesan), 28 F-5S <i>Tiger II</i> , 9 F-5T <i>Tiger II</i> , 5 F-50 <i>Maritime Enforcer</i>		<i>Super D Chinook</i> , 12 AS-532UL <i>Cougar</i> , EC-120B <i>Colibri</i> (disewakan), 6+ CH-47D <i>Chinook</i>
Thailand	165	35 F-5E <i>Tiger II</i> /F-5F <i>Tiger II</i> (32 unit sedang di-up grade), 2 F-5B (akan diganti dengan 4 JAS-39C/2 JAS-39D <i>Gripen</i> dari tahun 2011), 41 F-16A <i>Fighting Falcon</i> , 9 F-16B <i>Fighting Falcon</i> , 22 AU-23A <i>Peacemaker</i> , 18 GAF N-22B <i>Nomad</i>	47	3 AS-332L <i>Super Puma</i> , 3 AS-532A2 <i>Cougar MKII</i> , 13 Bell 212, 6 Bell 296B <i>Jet Ranger II</i> , 2 Bell 412 <i>Twin Huey</i> , 20 UH-1H <i>Iroquois</i>
Vietnam	219	140 MiG-21bis <i>Fishbed L & N</i> , 4 Su-30MKK <i>Flanker</i> , 7 Su-27SK <i>Flanker</i> , 53 Su-22M-3/M-4 <i>Fitter</i> , 4 Be-12 <i>Mail</i>	87	26 Mi-24 <i>Hind</i> , 3 Ka-25 <i>Hormone</i> , 10 Ka-28 (Ka-27PL) <i>Helix A</i> , 2 KA-32 <i>Helix C</i> , 4 Mi-6 <i>Hook</i> , 30 MI-17 (Mi-8MT) <i>Hip H</i> /Mi-8 <i>Hip Spt</i> , 12 UH-1H <i>Iroquois</i> , 4 PZL W-3 <i>Sokol</i>

Diolah dari *The Military Balance 2010*. Total berarti jumlah yang *capable*. Catatan: hingga tahun 2010, Indonesia memiliki pesawat tempur jenis Sukhoi sebanyak 10 unit.

Kendala Anggaran

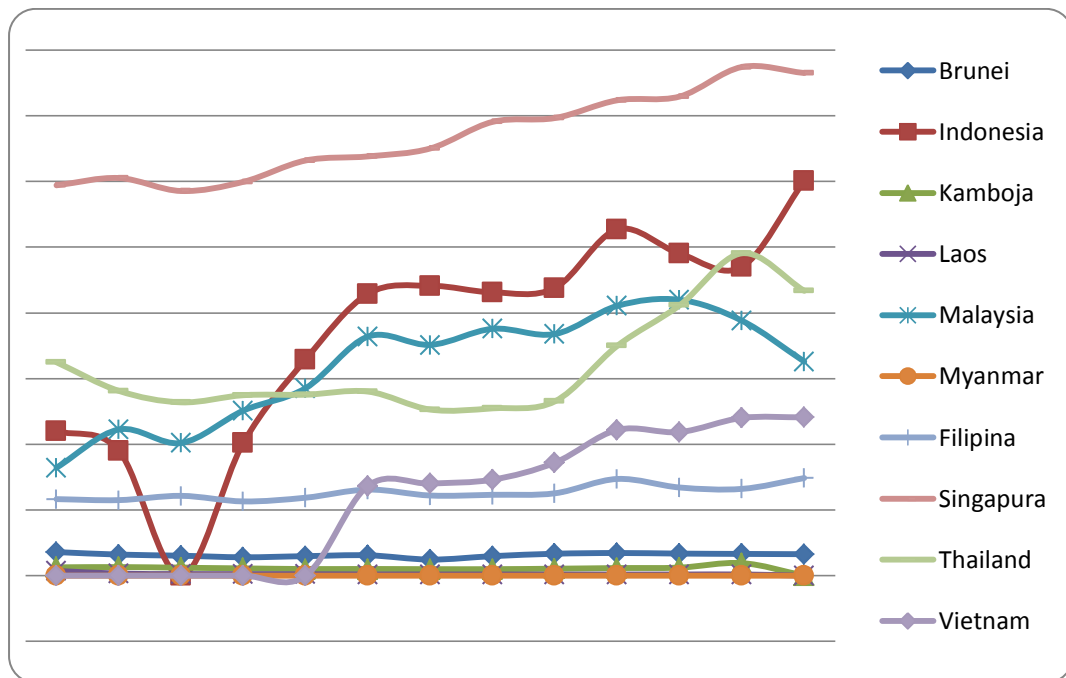
Negara-negara yang memiliki postur pertahanan yang besar dan tangguh, baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun global, cenderung mengalokasikan anggaran relatif besar untuk bidang pertahanan. Artinya, dengan alokasi belanja pertahanan yang relatif besar, kebutuhan akan

peralatan militer mereka dapat terpenuhi. Seperti diperlihatkan oleh Grafik 1, belanja pertahanan tertinggi di Asia Tenggara adalah Singapura yang terus mengalami peningkatan sejak 1998 hingga 2010 (garis teratas) dengan angka \$5,942 juta di tahun 1998 dan terus menanjak ke angka \$7,651 juta di tahun 2010. Sementara

Indonesia, yang berada di bawahnya, berfluktuasi, dengan dimulai pada angka \$2,204 juta di tahun 1998, sempat turun dalam tahun 1999

(\$1,902 juta), dan kembali meningkat hingga mencapai \$6,009 juta di tahun 2010.

Grafik 1
Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (juta US\$)



Diolah dari SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database*, <<http://milexdata.sipri.org/result.php4>>, diakses 15 Oktober 2011. Catatan: data Myanmar dan data Vietnam (untuk tahun 1998-2002) juga tidak tersedia.

Dalam hal belanja militer, kendala anggaran bagi pengembangan postur militer Indonesia masih menjadi persoalan mendasar. Prioritas pembangunan negara yang dilakukan Indonesia lebih menekankan pada bidang perekonomian. Alhasil, pembangunan bidang pertahanan sedikit lebih rendah dari upaya menyejahterakan masyarakat melalui upaya penguatan bidang ekonomi.

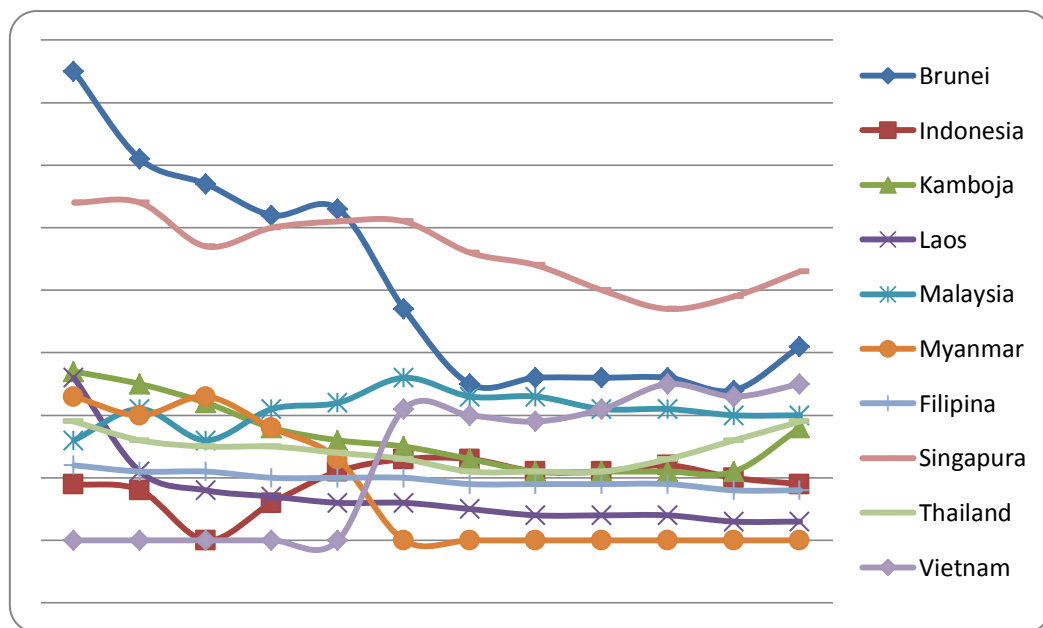
Indonesia lebih berkonsentrasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan beragam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat.⁹⁵ Dengan begitu, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat

⁹⁵ Untuk prioritas pembangunan Indonesia yang lebih menekankan pada bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian daripada bidang pertahanan ini, lihat misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, 'Amanat Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari TNI ke-60' dalam *Pertahanan, Keamanan, dan Perdamaian: Kumpulan Pidato dan Wawancara Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Dharmapena, 2005), 17.

ketika di satu sisi ada kebutuhan akan penguatan postur pertahanan dan di sisi lain juga ada tuntutan untuk semakin

menyejahterakan masyarakat yang sebagian besarnya masih miskin.

Grafik 2
Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara
(menurut persentase terhadap GDP)



Diolah dari *The SIPRI Military Expenditure Database*. Catatan: data Myanmar untuk tahun 2003-2009 dan data Vietnam untuk tahun 1998-2002 tidak tersedia.

Dengan prioritas Indonesia yang masih menitikberatkan pembangunannya pada sektor perekonomian domestik dan kesejahteraan rakyat, utamanya infrastruktur penunjang perekonomian dan kemakmuran masyarakat, maka hal ini berimplikasi terhadap minimnya alokasi belanja militer dalam perhitungan persentase terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB (Produk Domestik Bruto) sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.

Grafik 2 memperlihatkan bahwa Brunei adalah negara dengan persentase tertinggi (7,5%), walaupun terlihat turun drastis pascakrisis ekonomi 1997 hingga berada di titik 3,1% di tahun 2010. Penurunan Singapura tidak sefantastis Brunei. Sementara, besaran persentase anggaran pertahanan Indonesia dari PDB berada jauh di bawah Brunei, Singapura, dan bahkan Vietnam, Malaysia, Thailand, serta Kamboja. Indonesia tampaknya segaris dengan

Filipina dan sedikit berada di atas Laos. Tampaknya, dilema pembangunan seperti dijelaskan di atas berdampak pada persentase anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB yang hanya berada di sekitar angka 1%. Persentase itu dimulai dari angka 0,9% pada tahun 1998, sempat naik sedikit di atas 1%, dan kembali ke angka 0,9% hingga di tahun 2009.

Kendala Embargo

Persoalan besar lainnya yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan postur pertahanan adalah embargo oleh negara asing tempat peralatan dibeli. Embargo peralatan militer oleh Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, misalnya, dimulai pada tahun 1996, efektif berlaku sejak tahun 1999, dan dihentikan pada tahun 2005.⁹⁶ Pelajaran berharga yang dapat diperoleh dari kendala embargo ini, utamanya untuk masa yang akan datang, adalah bahwa pemerintah Indonesia harus secermat mungkin dalam melakukan operasi militer di dalam negeri agar tidak melanggar HAM mengingat negara-negara Barat kerap menjadikan dimensi HAM sebagai alat untuk menekan di bidang politik dan keamanan.

⁹⁶ Lihat Santosa, dkk., 51.

Kendala dalam Riset dan Pengembangan

Indonesia sendiri masih dihadapkan dengan pendanaan riset yang minim untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks yang luas, termasuk kecilnya anggaran di bidang pengembangan pertahanan. Padahal, aspek riset dan pengembangan ini adalah suatu hal yang mendasar bagi upaya penguatan postur pertahanan yang mengandalkan industri strategis domestik.⁹⁷

⁹⁷ Penulis belum menemukan data yang rinci mengenai anggaran riset & pengembangan di bidang pertahanan Indonesia. Akan tetapi, sebagai catatan, menurut Umar Anggara Jenie, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2007, Indonesia masuk dalam negara dengan anggaran riset dan pengembangan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Data yang tersedia untuk tahun 2004, misalnya, menyebutkan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan dana sebesar 0,1% dari GDP (*Gross Domestic Products*) untuk bidang riset dan pengembangan dalam konteks yang luas. Angka ini, menurut Jenie, berada di bawah Malaysia yang pada tahun 2005 mengalokasikan 0,7% dari GDP-nya. Masih data tahun 2005, angka yang lebih besar diperlihatkan oleh Singapura (2,2% GDP). Lihat selengkapnya Umar A. Jenie, 'Lampiran 1: Surat Ketua LIPI' dalam M. Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008, 250-251).

Data yang paling mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan anggaran sekitar Rp78 miliar untuk riset di bidang pertahanan tahun 2011 dan mengalami peningkatan yang lumayan signifikan untuk tahun 2012, yaitu Rp143,8 miliar, sebagaimana diperoleh dari *KBR68H (online)*, 'Litbang Kemenhan, Otak Dibalik Pertahanan Negara!', <<http://www.kbr68h.com/perbincangan/diskusi-lepas/11908-litbang-kemenhan-otak-dibalik-pertahanan-negara>>, diakses 17 Januari 2011.

Deterrent Effect: Kualitas atau Kuantitas?

Terkait dengan kuantitas dan kualitas peralatan militer, Indonesia lebih menekankan pada varietas dan kesetaraan teknologi daripada jumlah. Dengan begitu, fokus yang hendak disasar Indonesia ialah bagaimana teknologi yang digunakan Indonesia memperlihatkan kesetaraan mutu senjata yang dimiliki. Sebagai contoh, bila Singapura memiliki F-15, Indonesia dapat mengimbangnya dengan Sukhoi-30. Selain itu, kendati jumlahnya sedikit, Indonesia juga melakukan kerja sama dan alih teknologi agar peralatan militer yang dimiliki tidak tertinggal dari negara-negara lain.⁹⁸ Dalam merespon pembelian peralatan militer tertentu oleh negara tetangga, apakah yang bersifat ofensif ataupun agresif (termasuk radar), Indonesia tetap menjaga tingkat kecanggihan atau varietas teknologi yang dimiliki. Sebagai contoh, jika negara-negara lain memiliki radar jenis 'x', maka Indonesia juga harus mempunyai radar jenis 'x'. Bila jenis *striker* negara-negara lain adalah F-16, maka

Indonesia juga harus memiliki F-16. Menurutnya, walaupun Indonesia tidak mampu membeli dalam jumlah banyak, tetapi Indonesia harus memiliki peralatan tersebut serta harus setara dengan Singapura dan Malaysia.⁹⁹

Walaupun upaya *deterrence* yang dilakukan oleh Indonesia ini – antara lain dengan memperkuat postur (kekuatan dan kemampuan) militer pada ketiga angkatannya, yaitu darat, laut, dan udara – telah dilakukan; tetapi, karena tidak intensif dalam melakukan respon, keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan, maka Indonesia tidak mampu mengimbangi pembangunan postur pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga belum mencapai titik '*strategic stability*'. Dengan tidak mencapai posisi '*strategic stability*' ini, ada kemungkinan salah satu di antara negara-negara lain di kawasan lebih dulu menyerang Indonesia manakala terjadi gesekan atau eskalasi konflik yang mengarah pada perang di wilayah kedaulatan yang masih disengketakan.

⁹⁸ Wawancara dengan Sudarsono. Lihat juga '35 Triliun Anggaran Pertahanan 2009', *Media Indonesia*, 17 September 2008, 2; 'RI Fokuskan Kesetaraan Teknologi Pertahanan', *Suara Karya*, 17 September 2008, 4.

⁹⁹ Wawancara dengan Sudarsono.

Kesimpulan

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand, cukup intensif dalam memperkuat postur pertahanan masing-masing. Dalam masa itu, Singapura merupakan satu-satunya negara yang sangat agresif dalam memperkuat kekuatan dan kemampuan armada militernya, baik di matra darat, laut, maupun udara.

Ada titik-titik penting di mana Indonesia terlihat berupaya memperkuat postur pertahanannya, yaitu di tahun 2003, 2007, dan 2008. Namun, sejak tahun 1998, saat di mana krisis ekonomi terjadi di Asia Tenggara dan reformasi domestik juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terhadap kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-beratkan pada upaya meletakkan fondasi kesisteman dan kelembagaan yang bersifat jangka panjang agar Departemen (kini Kementerian) Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan alutsista, termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan TNI.

Upaya pengembangan postur militer baru tampak pada tahun 2003 ketika Indonesia melakukan kontrak pembelian persenjataan udara dengan Rusia, yaitu pembelian pesawat Sukhoi, dan merencanakan pengadaan empat unit kapal selam. Tahun-tahun 2007 dan 2008 adalah masa penting bagi perkembangan arah kebijakan pertahanan Indonesia karena dalam periode ini pemerintah mengeluarkan sejumlah dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan, yaitu kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan doktrin pertahanan.

Pelbagai industri strategis domestik yang dimiliki oleh Indonesia tampaknya belum secara penuh mendukung kebutuhan alutsista bagi ketiga angkatan. Dilema keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hanya berada pada tingkat kompetisi persenjataan konvensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Herz, John H., 'Idealist Internationalism and Security Dilemma', *World Politics*, vol. 2, no. 2, 1950, pp. 157-158.

Buku dan Edited Volume:

Buzan, Barry, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London: MacMillan Press, 1987.

Collins, Alan, *The Security Dilemmas of Southeast Asia*. London: MacMillan Press, 2000.

Gray, Colin S., *War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History*. New York: Routledge, 2007.

Hakim, Chappy, *Dari Segara ke Angkasa. Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Herz, John H., *International Politics in the Atomic Age*. New York: Columbia University Press, 1959.

IISS, *The Military Balance 2010*. London: the International Institute for Strategic Studies, 2010.

Jenie, Umar A., 'Lampiran 1: Surat Ketua LIPI' dalam Rais, M. Amien, *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press, 2008, 250-251.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Revisi Postur Tentara Nasional Indonesia Tahun 2000-2014*. Jakarta: Markas Besar TNI, 2004.

Morgenthau, Hans J., *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 6th edn, edisi Bahasa Indonesia *Politik Antarbangsa*, (S.Maimoen, A.M. Fatwan, dan Cecep Sudrajat, penerj.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Muhaimin, Yahya A., *Bambu Runcing & Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Tiara Wacana, 2008.

NIDS, *East Asian Strategic Review 2000*. Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2000.

-----, *East Asian Strategic Review 2004*. Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2004.

-----, *East Asian Strategic Review 2005*. Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2005.

-----, *East Asian Strategic Review 2007*. Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2007.

-----, *East Asian Strategic Review 2009*. Tokyo: the National Institute for Defense Studies, 2009

Prihatono, T.H. dkk., *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute, 2007.

Santosa, Teguh, dkk., *Komisi I: Senjata-Satelit-Diplomasi*. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2009.

Tongzon, Jose L., *The Economies of Southeast Asia: Before and After the Crisis*, 2nd edn. Massachusetts: Edward Elgard Publishing, 2002.

Viotti, Paul R., dan Kauppi, Mark V., *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 3rd edn, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.

Yudhoyono, Susilo Bambang, 'Amanat Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari TNI ke-60' dalam *Pertahanan, Keamanan, dan Perdamaian. Kumpulan Pidato dan Wawancara Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Dharmapena, 2005, 17.

Artikel Online:

Antaraneews.com, *Korvet Sigma TNI AL Buatan Belanda Tiba di Indonesia*,

<<http://www.antaranews.com/print/75637/maluku-religious-leaders-urge-people-not-be-provoked>>, diakses 16 November 2011.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008 (online)*, 2008, p. 7, <http://www2.kemhan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf>, diakses 23 April 2011.

KBR68H, 'Litbang Kemenhan, Otak Dibalik Pertahanan Negara!', <<http://www.kbr68h.com/perbinangan/diskusi-lepas/11908-litbang-kemenhan-otak-dibalik-pertahanan-negara>>, diakses 17 Januari 2011.

SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database (online)*, <<http://milexdata.sipri.org/result.php4>>, diakses 15 Oktober 2011.

Yustinigrum, R.E.E., *Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia*, LIPI, Jakarta, 2011, <<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia->>, diakses 21 September 2011.

Artikel Surat Kabar:

'35 Triliun Anggaran Pertahanan 2009', *Media Indonesia*, 17 September 2008, 2.

'RI Fokuskan Kesetaraan Teknologi Pertahanan', *Suara Karya*, 17 September 2008, 4.

Artikel Majalah:

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan*, vol. 18, No. 4, November-Desember 2006.

----, *WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan*, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2010.

Wawancara:

Wawancara dengan Andi Widjajanto, Depok, 27 Mei 2011.

Wawancara dengan Juwono Sudarsono, Jakarta, 12 Mei 2011.

PETUNJUK PENULISAN

1. Artikel harus orisinal dan belum pernah dimuat di media penerbitan lain atau sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan.
2. Tulisan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Jumlah kata 4000-5000 kata dengan format penulisan *Turabian Style*.
4. Sistematika Penulisan artikel adalah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan efektif, maksimal 15 kata)
 - b. Nama Penulis
 - c. Abstrak dalam Bahasa Inggris (150-200 kata)
 - d. Kata-kata kunci (5 kata)
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian (untuk artikel hasil penelitian)
 - g. Hasil dan pembahasan
 - h. Kesimpulan dan Saran
 - i. Bibliografi
5. Berikut adalah contoh penulisan (*Turabian Style*) catatan kaki (**N**) dan sekaligus contoh penulisan pada bibliografi (**B**). Panduan ini berasal dari buku *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* ed. yang ditulis Kate L. Turabian.

Catatan: Pengutipan pada sumber berupa ide atau kutipan langsung harus muncul dalam catatan kaki dalam angka yang berurutan.

Pengutipan untuk pertama kalinya harus dilakukan secara penuh; nama (nama pertama lebih dulu), judul, tempat, penerbit, tahun dan nomor halaman atau bagian yang dikutip.

Pengutipan selanjutnya untuk karya yang sama bisa disingkat.

Buku

Dua Penulis

N 1. Kai Bird and Martin J. Sherwin, *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer* (New York: Alfred A. Knopf, 2005), 52.

B Bird, Kai, and Martin J. Sherwin. *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer*. New York: Alfred A. Knopf, 2005.

Bentuk Singkat dari Satu karya yang sebelumnya sudah pernah dikutip

Ketika satu karya yang dikutip telah dikutip sebelumnya dan langsung pada satu halaman berikutnya dikutip.

N 20. Philip Ball, *Bright Earth: Art and the Invention of Color* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 140.

N 21. *Ibid.*, 145.

Jika karya yang dikutip sudah pernah dikutip sebelumnya, tapi tidak langsung pada satu halaman yang sama dan hanya satu karya dari penulis yang sama pernah dikutip

N 22. Ball, 204.

Jika dua atau lebih karya sudah pernah dikutip sebelumnya, gunakan tambahan judul singkat

N 23. Ball, *Bright Earth*, 204.

6. Naskah dialamatkan pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2 Kampus Limau Manis Padang, 25163 Telp/fax: (0751)71266,

Formulir berlangganan	
Andalas Journal of International Studies	
Mohon dicatat sebagai pelanggan Andalas Journal of International Studies	
Nama :	
Alamat :	
Telp/ HP :	
e-mail :	
Jumlah Berlanggan : eksamplar
Biaya berlangganan saya kirim lewat rekening a/n Bank no Rekening	

Biaya berlangganan 1 eksamplar atau 1 edisi terbit Rp35.000,-; sudah termasuk ongkos kirim

Andalas Journal of International Studies, is a journal for scholars, observers, and researchers in international studies in expressing ideas and thoughts related to the dynamic and issues of international relations. The dynamics of contemporary in international relations are increasingly complex. It demands the academic community to provide ideas that are more creative, brilliant and helpful for humanity. From these conditions, this journal comes to participate in scholarly discourse within the framework of strengthening the scientific community of international relations more solid and dynamic. Andalas Journal of International Studies to carry the ideals of unity not only in the frame of the mainstream, but is also present in the struggle optimism alternative ideas, like the spirit of crafting the alternatives from the corner of the community in the ideal arrangement for a better understanding in International Studies

ISSN 2301-8208

